

BAB II
DINAMIKA HUBUNGAN LUAR NEGERI IRAN-ISRAEL
TAHUN 1970-2007

Dinamika politik luar negeri negara-negara dunia, ternyata tidak lepas pasang-surut (fluktuasi), bahkan pada beberapa kasus politik luar negeri dapat mengkalim sebuah negara yang dianggap sebagai “musuh abadi”. Salah satu kasus tentang persetujuan politik luar negeri terjadi antara Iran dan Israel. Pada bab II ini akan diuraikan tentang gambaran mengenai politik luar negeri Iran dan Israel, mencakup era rezim Shah Reza Pahlevi hingga Mohammad Khatami.

A. Dinamika Politik Luar Negeri Iran dan Israel

Keberadaan Iran dan Israel meskipun sama-sama terletak di wilayah Timu-Tengah, namun diantara keduanya memiliki perbedaan menonjol di berbagai bidang, termasuk orientasi politik luar negeri. Keberadaan kedua negara tidak lepas dari politik luar negeri karena disinilah kepentingan nasional dapat diwujudkan, karena pada era globalisasim ternyata kebutuhan suatu negara sifatnya adalah tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara sifatnya adalah terbatas.

1. Politik Luar Negeri Iran

Politik luar negeri Iran merupakan refleksi politik dalam negeri Iran yang mengalami perubahan secara fundamental pada konstitusi tahun 1979. Negara ini merupakan negara berideologi Republik Islam melalui amandemen konstitusinya pada tahun 1989.¹

Politik dan pemerintahan Iran terbagi atas tiga bentuk kekuasaan formal, yaitu :²

- a. Legislatif, yaitu parlemen Iran yang beranggotakan 290 anggota yang dipilih pada periode empat tahun sekali.

Bidang legislatif di Iran memiliki peranan penting dalam membuat sistem perundang-undangan dan kehakiman. Sistem yang dianut oleh lembaga legislatif Iran adalah unikameral, sedangkan sebelum revolusi bersistem bikameral, yang setengah dipilih dan juga ditunjuk oleh pemimpin agung Iran. Bidang legislatif Iran terdiri dari 290 anggota.

Bidang legislatif di Iran juga terdapat sub-lembaga yang disebut dengan Dewan Garda Nasional, dimana organisasi ini terdiri dari 12 ahli hukum, termasuk di dalamnya enam ulama yang sebelumnya ditunjuk oleh pemimpin agung dan sisanya dipilih oleh parlemen (Majelis).

- b. Eksekutif, yaitu divisi kekuasaan yang dipimpin oleh presiden yang juga membawahi garda nasional.

¹ "Iran : Political History and Overviews", The Book of Fact, <http://www.cia.gov>, diakses pada tanggal 8 Desember 2009.

² *Ibid.*

Bidang legislatif Iran memiliki peranan yang penting karena pada bidang inilah mekanisme pemerintahan negara ini dijalankan. Secara struktural sistem kepemimpinan di Iran pada puncak tertinggi (*top person*) di pegang oleh pemimpin agung, yaitu dua pendiri republik masing-masing adalah Ayatollah Rohullah Khomaeni dan penggantinya Ali Khamaeni. Tugas utama dari pemimpin agung di Iran adalah sebagai pasukan tertinggi angkatan bersenjata Iran, direktur nasional jaringan radio dan televisi Iran, kepala utama yayasan keagamaan, pemimpin masjid di Iran, sekaligus sebagai anggota dewan keamanan nasional.

- c. Yudikatif, yaitu lembaga peradilan yang terdiri dari pengadilan umum, yang menangani masalah pidana dan perdata, serta pengadilan revolusioner. Sistem peradilan Iran ini banyak di dominasi oleh syaria (hukum agama). Keberadaan pengadilan revolusioner keberadaannya tidak dapat diganggu-gugat, selain itu juga terdapat pengadilan clerical yang ditujukan untuk menangani para ulama yang bersalah.

Apabila ditinjau dari lembaga mana yang paling berpengaruh di Iran, berdasar pada analisis penulis adalah presiden (eksekutif) dan Imam besar Iran. Hal ini tidak lepas dari karakter keduanya, dimana presiden Iran merupakan pemimpin formal tertinggi di Iran yang berperan dalam menjalankan negara ini, termasuk untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dan politik luar negeri Iran, sedangkan Imam Besar Iran menjadi aktor yang paling berpengaruh karena menjadi simbol nasional Iran.

Keberadaan politik luar negeri Iran, baik secara konseptual ataupun normatif memang tidak bisa lepas dari hukum positif yang menyangkut bahwa Iran adalah negara Republik Islam. Makna dasar mengenai bentuk republik Islam adalah menyangkut pada konsepsi hukum positif dengan aturan-aturan Syariah, dimana negara yang menganut sistem ini tidak selali bercorak monarkhi.³

Beberapa negara dunia yang telah berhasil menjalankan sistem ideologi negara berdasar pada sistem republik Islam, seluruhnya terletak di wilayah Asia-Afrika antara lain, yaitu :⁴

- a. Pakistan.
- b. Afghanistan
- c. Mauritania.
- d. Iran.

Berdasar pada konstitusi Iran, tujuan dari politik luar negeri negara ini adalah untuk mewujudkan tata negara yang maju berdasar pada ketentian-ketentuan Syariah atas dasar solidaritas Islam. Berdasarkan pada tujuan politik luar negeri tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa pada kasus sikap Iran terhadap Israel dalam kasus invasi negara ini ke Palestina tahun 2008 sangat relevan dengan tujuan politik luar negeri Iran yang salah satu ketentuannya menekankan pada nilai-nilai solidaritas Islam.⁵

Keberadaan Iran sebagai negara yang berbentuk "Republik Islam" ternyata telah berhasil membawa negara ini sebagai negara yang cenderung anti-Barat. Hal

³ "The World of Islamic Republic", The Book of Fact, <http://www.cia.gov>, diakses pada tanggal 21 Desember 2009.

⁴ *Ibid.*

⁵ "Iran Foreign Politic of Effectiveness and Continuity", <http://www.highbeam.com>, diakses pada tanggal 16 Januari 2010.

ini tidak lepas dari kenyataan bahwa nilai-nilai Islam yang dipegang oleh masyarakat dan elit Iran cenderung berseberangan dengan perkembangan liberalisme-kapitalisme asing.

2. Politik Luar Negeri Israel

Israel merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Timur Tengah yang hingga tahun 2008 keberadaannya masih dipersoalkan oleh negara-negara lainnya di wilayah ini. Negara ini terhimpit oleh hegemoni nasionalisme Arab. Bahkan Israel dianggap sebagai negara yang bercorak liberalis.

Liberalisme merupakan faham atau ideologi yang berkembang di Israel penting yang turut memberikan pemikiran-pemikiran bagi dinamika percaturan politik internasional. Secara harfiah liberalisme merupakan sebuah ideologi atau pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan merupakan kiblat (fokus) dari nilai politik yang dominan.

Cita-cita atau tujuan dari liberalisme adalah mewujudkan sebuah kondisi masyarakat yang bebas, yang diorientasikan pada kebebasan berpikir dari para individu. Liberalisme menentang adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan golongan moralis. Beberapa bukti mengenai perkembangan liberalisme di Israel antara lain dapat dilihat dari orientasi politik luar negerinya, yaitu :⁶

- a. Pertukaran gagasan yang bebas.

⁶ "Liberalisme : The World Most National State : Israelly", <http://www.iht.org>., diakses pada tanggal 8 Desember 2009.

- b. Ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (perseorangan) atau yang lazim disebut "*private enterprise*".
- c. Suatu pemerintahan yang transparan yang menolak pembatasan kepemilikan individu.

Seperti halnya negara-negara moderen, sistem perimbangan kekuasaan Israel dibagi tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada bidang perundang-undangan, sistem peradilan Israel tiga bagian, yaitu :⁷

- a. Hakim peradilan yang berperan sebagai peradilan tingkat pertama.
- b. Hakim distrik yang berperan sebagai peradilan banding pertama.
- c. Mahkamah Agung yang berperan untuk menyelesaikan masalah peradilan otoritas negara yang terletak di Yerusalem.

Politik luar negeri Israel mengalami perkembangan yang pesat pada pertengahan dekade tahun 1970-an. Dominasinya pada beberapa negara maju, misalnya Inggris dan Amerika Serikat mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri negara-negara dikuasa dunia.

Cara-cara yang pada umumnya dijalankan oleh kelompok negara Barat yang banyak dipengaruhi oleh zionis Israel sehingga posisinya menjadi kurang berimbang dalam merealisasikan kepentingan-kepentingannya atas negara

⁷ "Israel : Politic and Government", <http://www.en.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 8 Desember 2009.

berkembang, yang dapat diklasifikasikan sebagai cara-cara yang cenderung lebih represif adalah sebagai berikut :⁸

- a. Protes yang bersifat rahasia kepada pemerintah yang bersangkutan.
- b. Protes bersama yang dibuat dengan pemerintah-pemerintah lain.
- c. Pernyataan keprihatinan yang terbuka dalam parlemen atau tempat lain.
- d. Dukungan bagi pembicaraan-pembicaraan dalam badan-badan seperti komisi PBB.
- e. Dimulainya segera tindakan demikian dalam badan-badan internasional.

Sistem politik luar negeri Israel dijalankan oleh perdana menteri yang juga merupakan kepala pemerintahan. Dalam mendukung orientasi politik luar negerinya, sebagai bagian pencapaian kepentingan nasional, Israel juga aktif dalam beberapa organisasi internasional, antara lain, yaitu :⁹

- a. Organisasi Kerjasama Ekonomi laut Hitam (BSEC, *Black Sea Economic Cooperations*).
- b. Dewan Eropa (EC, *European Council*).
- c. Organisasi Komisi PBB Untuk Eropa (ECE, *Economic Cooperations of Europeans*).
- d. Badan Kerjasama Internasional (IFC, *International Finance Cooperations*)

⁸ Evan Luard Hak-hak Asasi Manusia dan Kebijakan Luar Negeri dalam Sidiq Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 2000, hal. 2-3.

⁹ "Israley Foreign Relations", <http://www.infoplease.com>., diakses pada tanggal 21 Desember 2009.



- e. Organisasi Kerjasama dan Keamanan Uni Eropa (OSCE, *Organisations of Security Cooperations European*).

Dengan demikian melalui uraian di atas maka dapat diketahui tentang politik luar negeri Israel dan Iran yang sebenarnya memiliki berbagai kesamaan sebagai negara moderen. Perkembangan percaturan politik Timur-Tengah yang semakin kompleks ternyata berdampak pada persetujuan antara kedua negara akibat kasus Palestina, yang kemudian berujung pada diplomasi konfrontatif yang akan dibahas pada uraian bab selanjutnya.

B. Perkembangan Politik Luar Negeri Iran Terhadap Israel

Perkembangan politik luar negeri Iran terhadap Israel ternyata tidak selalu berjalan srat dengan konflik. Pada beberapa tahun silam, hubungan kedua negara juga dapat berjalan dengan harmonis. Fase-fase dari rezim kepemimpinan di Iran sejak Shah Reza Pahlevi hingga rezim Khatami akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Rezim Kepemimpinan Shah Reza Pahlevi

Politik luar negeri Iran pada masa Shah Reza Pahlevi sangatlah pro-Barat terutama Amerika. Dominasi pengaruh Amerika pada zaman Shah ini melahirkan kebencian yang sangat dalam terhadap Amerika. Iran mempunyai dua alasan penting dalam hubungannya dengan Amerika. Pertama, volume bantuan militer dan ekonomi harus ditingkatkan. Disamping itu Amerika telah berjanji untuk membantu Iran jika Iran mendapat ancaman eksternal. Dan Iran enar-benar mutlak

berada di bawah Amerika Serikat. Pengaruh Amerika Serikat dalam militer Iran pun kemudian dimulai Amerika mengadakan pertemuan dengan para pemimpin militer bentukan Shah yang menggelar kerjasama militer kedua negara. Kerjasama ini meliputi bidang teknologi persenjataan, strategi perang, kualitas personal dan bantuan Amerika Serikat terhadap militer Iran.

Konsekwensi dari bantuan militer Amerika Serikat terhadap militer Iran adalah bahwa militer Iran harus pro dan mendukung kebijakan-kebijakan Amerika Serikat baik di Iran sendiri maupun di kawasan Timur Tengah. Sebagai daerah penyangga, Amerika Serikat sangat berkepentingan terhadap Iran khususnya dalam upaya Containment policy-nya terhadap pengeruh komunisme Soviet. Oleh karena itu Amerika memberikan bantuan militer dan ekonomi yang besar terhadap Iran, harapannya agar Iran tidak jatuh kedalam kekuasaan komunisme Soviet.¹⁰

Pada tahun 1957 Amerika membantu Iran dalam pembentukan polisi rahasia. SAVAK (*Sazman-e Etelaat va Amniyat Kasvar*) organisasi komunikasi dan keamanan wilayah, merupakan polisi dinas rahasia Iran yang terkuat nomor 5 di dunia. Pada tahun 1959 Shah menandatangani persetujuan bilateral bidang militer dengan pemerintahan Amerika Serikat sehingga Iran menjadi sangat menyatu ke dalam sistem militer dan politik Barat. Dengan menjalin hubungan militer dengan Barat, dimungkinkan kemudian akan dapat memposisikan Shah sebagai penguasa yang kuat, yang ditopang oleh Amerika Serikat. Singkatnya, Shah dijadikan alat dan boneka Amerika Serikat dalam memerangi setiap ancaman. Setidaknya terdapat delapan presiden Amerika Serikat yang mendukung

¹⁰ Ray Takeyh, *Hidden Iran : Paradogs and Power in the Islamic Republic*, Lyence Reyneer Publisher, New York, 2006, hal.28.

Shah dan seluruh kebijakannya, baik dari aspek ekonomi ataupun politik. Dalam bidang ekonomi ataupun politik. Dalam bidang ekonomi saja banyak sekali transaksi yang dilakukan oleh kedua negara yang sedang berteman baik ini. Diantaranya adalah impor yang dilakukan oleh Iran senilai US\$ 3,8 miliar per tahun, pembelian peralatan militer senilai US\$ 2,6 miliar. Bahkan ditahun 1974-1979 Iran merupakan pelanggan terbesar dari industri persenjataan di Amerika. Disamping itu kedekatan antara pemerintah Amerika dan Iran dalam merencanakan pembangunan di Iran. Sehingga semua bidang kehidupan di Iran ketika itu menjadi terhegemoni oleh kekuatan Amerika Serikat dan menjadikan Iran lambat laun mengalami ketergantungan ekonomi – politik terhadap Amerika Serikat.¹¹

Masalah terpenting yang menimbulkan kemarahan rakyat Iran terhadap rezim Shah adalah dijalinnya hubungan diplomatik yang erat dengan rezim Zionis dan diberlakukannya Undang-undang (UU) Kapitulasi yang sangat menghina kedaulatan bangsa Iran. UU Kapitulasi adalah UU yang memberikan kebebasan terhadap warga Amerika yang berada di Iran dari segala tuntutan hukum bila mereka melakukan tindakan kriminal di wilayah Iran. Bahkan lebih disesalkan adalah kendali Israel dan para agennya dalam persoalan-persoalan sensitive Iran. Dan cengkeraman yang Israel lakukan terhadap institusi ekonomi Iran dengan bantuan pemerintah dan para agen rezim tirani. Israel sedang berperang dengan pemerintah negara Islam namun masih saja pemerintah Iran memperlakukannya sebagai teman dekat membantunya engan segala macam alat propaganda serta

¹¹ *Ibid.*

memfasilitasi impor barang-barangnya dengan segala cara. Shah juga membawa sejumlah penceramah-penceramah Iran ke kantor badan keamanan (SAVAK) dan diperingatkan bahwa mereka boleh berbicara apapun kecuali tiga hal, yaitu mengatakan keburukan atas Shah, menyerang Israel dan mengatakan bahwa Islam dalam bahaya. Bukan hanya itu saja, tapi Shah juga telam memberikan tanah pertanian orang Iran kepada orang-orang Israel untuk ditanami gula bit.

2. Rezim Kepemimpinan Imam Ayatollah Ruhullah Khomaeni

Berdirinya Republik Islam Iran dan tumbanganya kekuasaan Shah Iran menjadikan Khomeini, sang revolusioner sebagai pemimpin tertinggi di Iran. Arah politik luar negerinya pun berubah haluan. Perubahan ini pun mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik negara-negara tetangga Iran dan juga negara-negara adidaya.

Politik luar negeri Iran dibawah Khomeini sangat konfrontatif terhadap Barat terutama Amerika. Politik luar negeri Republik Islam Iran di masa Khomeini ditandai dengan diberlakukannya cap setan besar (shytan-e bozorg) atas Amerika. Sikap anti-Amerika politik luar negeri Khomeini berkaitan dengan keterlibatan Amerika secara langsung maupun tidak langsung di dalam kekuasaan absolut dan repressif Shah Iran. Keterlibatan Amerika inilah yang membentuk pandangan atau presepsi rakyat Iran bahwa campur tangan Amerika di Iran hanya membawa kesengsaraan rakyat. Dan jika Amerika terlibat dalam perpolitikan Iran lagi maka rakyat Iran akan merasa tersakiti untuk yang kedua kalinya. Bagi Khomeini Amerika Serikat di zaman Shah telah melakukan imperialisme dan

kolonialisme terselubung sehingga muncul ungkapan sarkastiknya kepada Amerika sebagai "setan besar".

Beberapa peristiwa penting menandai sikap Iran terhadap Amerika. Peristiwa pertama adalah penyenderaan di Kedutaan Besar Amerika di Teheran oleh para mahasiswa Iran pada 4 November 1979 yang berlangsung lebih dari satu tahun, tepatnya 444 hari. Didudukinya kedutaan besar Amerika oleh mahasiswa Iran ini memang bukan tanpa sebab, setelah Revolusi Islam Iran berhasil dilakukan secara mengagumkan pada Februari 1979, Amerika tampaknya tidak bisa menerima kenyataan ini. Para mahasiswa yang berfikir jeli dan kritis mengamati kenyataan digunakannya Kedutaan Besar Amerika untuk melancarkan usaha-usaha destabilisasi Iran. Karena itu untuk menggagalkan usaha-usaha tersebut mereka menduduki kedutaan Amerika, dan kemudian dokumen-dokumen yang belum sempat dibakar diketahui bahwa ternyata Kedutaan Besar itu memang menjadi espionage nest atau sarang spionase Intelijen Amerika (CIA) dan Agen Rahasia Israel (MOSSAD). Dari dokumen-dokumen yang sempat disiarkan yang berkualifikasi secret, confidential dan top-secret kita bisa memahami alasan mengapa para mahasiswa memiliki keberanian moral untuk menyandera diplomat-diplomat Amerika.¹²

Pada periode kepemimpinan Shah Khomaeni kekuatan Israel tidak dapat dilepaskan dari Amerika Serikat. Pada periode ini Israel berada mampu mengambil keuntungan dari cara-cara represif Amerika Serikat dalam menekan negara-negara dunia. Dalam merealisasikan kepentingan-kepentingannya atas

¹² *Ibid.*

negara berkembang, yang dapat diklasifikasikan sebagai cara-cara yang cenderung lebih represif adalah sebagai berikut :¹³

- a. Protes yang bersifat rahasia kepada pemerintah yang bersangkutan.
- b. Protes bersama yang dibuat dengan pemerintah-pemerintah lain.
- c. Pernyataan keprihatinan yang terbuka dalam parlemen atau tempat lain.
- d. Dukungan bagi pembicaraan-pembicaraan dalam badan-badan seperti komisi PBB.
- e. Dimulainya segera tindakan demikian dalam badan-badan internasional.¹⁴

Dalam kasus penyanderaan ini hampir seluruh pers Barat memojokkan Iran, banyak dari mereka menganggap bahwa kasus penyanderaan merupakan usaha Imam Khomeini untuk melepaskan diri dari elemen-elemen sekuler dari dalam pemerintahannya, dan memobilisasi dukungan massa bagi suatu transformasi radikal struktur politik dan kepemimpinannya. Namun tidak semua pers Barat beranggapan seperti itu, seorang penulis amerika, Robin Woodswarth Carlsen menulis "*Crisi in Iran : A Microcosm of The Cosmic Play*", dimana ia mengungkapkan tinjauan moral, politik, psikologis, spiritual dan aesterik atas penyanderaan para diplomat Amerika di Teheran itu. Pasca penyanderaan, politik luar negeri Iran yang dulunya bersikap radikal menjadi agak moderat. Hal ini disebabkan karena Republik Islam Iran terancam oleh problem-problem sosial,

¹³ Evan Luard Hak-hak Asasi Manusia dan Kebijakan Luar Negeri dalam Sidiq Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi : Membongkar Politik Stndar Ganda Amerika Srikat*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 2000, hal. 2-3.

¹⁴ Berdasar pada data yang tersedia cara-cara diatas bukan hanya lima, namun terdapat tiga belas. Hal ini dikarenakan pada aspek perdagangan internasional berdasar pada analisa penulis hanya mencapai level kelima, belum parah hingga mencapai level ketiga belas antara lain pemutusan hubungan diplomatik ataupun pengekangan kontak kebudayaan dan lainnya.

ekonomi dan politik, karena perang melawan Iran belum berakhir. Selain itu juga karena munculnya tokoh yang berpengaruh seperti Khomeini.¹⁵

3. Rezim Kepemimpinan Rafsanjani

Perubahan orientasi politik luar negeri Iran mulai terlihat tanda-tandanya semenjak Rafsanjani terpilih sebagai Presiden Republik Islam Iran. Pada masa ini Iran memasuki era baru. Rafsanjani terpilih sebagai Presiden Republik Islam Iran. Pada masa ini Iran memasuki era baru. Rafsanjani membangun apa yang dapat disebut sebagai Iran baru, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pragmatisme berada di puncak. Rafsanjani mengawali era stabilitas yang gagal diperjuangkan Bazargan dan Bani Sadr. Dia membangun bendungan, mengaspal jalan, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan perumahan yang rusak selama perang dengan mengutang pada lembaga Internasional seperti IMF dan Word Bank. Rafsanjani memprakarsai terciptanya hubungan kembali dengan negara-negara Arab, dengan jalan memperlebar sektor perdagangan seperti dengan Turkey dan Pakistan. Untuk membuktikan kesungguhannya, Rafsanjani memilih mengambil posisi moderat dalam krisis teluk yang melibatkan Amerika dan sekutunya melawan Irak yang menduduki Kuwait.

Sikap moderat ini menguntungkan dan dapat dimanfaatkan untuk mengambil hati negara-negara Arab yang sebelumnya cemas dengan proyek ekspor revolusi yang dicanangkan oleh Khomeini. Rafsanjani mengakui tuduhan Amerika bahwa Iran memang melakukan ekspor revolusi. Tapi ekspor revolusi

¹⁵ *Ibid.*

yang dilakukan oleh Iran itu hanya sebatas mempromosikan ide-ide saja, bukan mengobarkan perang seperti Amerika dengan mengeksport tank-tank. Yang tidak kalah menarik adalah tuduhan Amerika bahwa Iran telah mencetak uang palsu untuk membayar transaksi pembelian senjata. Singkatnya propaganda media massa Amerika yang agresif terus dilakukan. Inilah yang ingin dihapus oleh pemerintah Iran dengan mengundang lebih dari 100 wartawan dari berbagai negara pada bulan Juni 1994. Para wartawan dipersilahkan menulis sendiri tentang apa yang mereka lihat di Iran. Selain itu dia juga menghidupkan kembali hubungan dengan negara-negara ketiga seperti Brazil dan India. Namun upayanya untuk membuka kembali hubungan dengan negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi tanpa hasil karena banyak mendapatkan tantangan dari kubu konservatif.

Rafsanjani juga berusaha untuk membuka hubungan kembali dengan negara-negara Eropa. Sekalipun demikian, sepanjang pemerintahan Rafsanjani pembunuhan politik di luar Iran terhadap musuh-musuh Iran atau kelompok orang yang dianggap musuh Republik Islam Iran. Tindakan kekerasan yang terkait dengan pemerintahan Iran inilah yang membuat negara-negara Barat tetap curiga terhadap Iran dan menuduhnya sebagai dalang teroris berbagai peristiwa di berbagai belahan dunia. Jerman dan beberapa negara Eropa sempat menarik duta besarnya sebagai protes atas pembunuhan di Berlin tahun 1992 yang menurut penyelidikan pemerintahan Jerman bertalian dengan komando dari petinggi pemerintahan Rafsanjani. Peristiwa terbunuhnya empat tokoh kurdi Iran di sebuah café Berlin, yang dikenal sebagai Mykonos Affairs, diduga melibatkan agen intelejen Iran. Lima tahun kemudian pengadilan tinggi Jerman menuduh Direktur

Intelijen Iran Fallahian dan bahkan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei terlibat dalam pembunuhan tersebut. Krisis hubungan Iran – Jerman pecah dengan sendirinya sebagai akibat dari tuduhan tersebut dan demonstrasi anti-Jerman pun marak di Teheran. Pemerintah Jerman bahkan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Ali Fallahian.

Khatami bisa dikatakan sebagai tokoh yang berusaha menciptakan iklim politik luar negeri yang lebih segar, sehat dan tidak terlalu ideologis. Di bawah pemerintahan Khatami politik luar negeri Iran sampai pada tingkat tertentu, dapat dikatakan politik luar negerinya memasuki tahap transformasi. Salah satu kesuksesan Khatami adalah penyelenggaraan Konferensi OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Teheran tahun 1997. Kegiatan ini merupakan bukti keberhasilan awal reorientasi politik luar negeri Iran yang dirintis Rafsanjani. Sebagai penerus Khatami berhasil meyakinkan negara-negara Arab bahwa Iran telah berubah dan tidak ingin kembali pada era politik luar negeri yang ideologis yang cenderung mengeksport revolusi ke negara-negara tetangganya di kawasan Arab walaupun tidak pernah berhasil.

Kehadiran seluruh anggota OKI merupakan bukti bahwa Iran bukan lagi ancaman bagi negara-negara Arab. Berkurangnya kecemasan negara-negara Arab terhadap kemungkinan ancaman Iran terhadap negara mereka membuka jalan bagi perbaikan kembali hubungan Iran dengan Arab dalam tahun berikutnya. Perjanjian kerjasama dengan Arab Saudi merupakan pintu masuk bagi Iran untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara Arab penting seperti Mesir. Walaupun Persatuan Emirat Arab masih belum sepenuhnya menerima kehadiran

kembali Iran di tengah-tengah bangsa Arab, Khatami cukup berhasil memperkuat upaya reorientasi politik luar negeri Iran yang lebih realistis.

Hubungan baik tersebut tidak sepenuhnya terjalin dengan semua negara Arab. Khatami, tetap mendukung kelompok anti-Saddam Hussein yang membangun markasnya di Iran. Selain itu Iran di bawah Khatami juga tidak memiliki hubungan baik dengan pemerintah Taliban di Afganistan. Iran juga sangat menentang Turki yang menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat secara eksklusif yang turut berpengaruh pada perpecahan diantara negara-negara Arab.

Manuver Khatami yang paling sukses adalah upaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Eropa. Dimulai dengan kunjungan ke Roma, Italia, Khatami melanjutkan perjalanan ke Paris dan negara Eropa lainnya. Muhibah ke negara-negara Eropa ini sangat membantu popularitas Khatami, khususnya di kawasan Eropa termasuk Inggris. Bahkan Khatami dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa bagi Iran urusan Salman Rusdie dianggap telah selesai. Dampak positif kebijakan Eropa Khatami adalah meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Eropa. Di Roma media massa internasional mencatat bahwa kehadiran Khatami di Eropa merupakan kunjungan bersejarah karena ia membawa pesan perdamaian dalam bentuk ajakan untuk berdialog dengan negara-negara barat setelah sekian lama menyendiri. Ajakan ini sangat besar pengaruhnya karena sukses kunjungan diplomatik ke Italia membuat Perancis, Jerman dan akhirnya Inggris merasa perlu untuk memperbaiki kembali hubungan dengan Iran.

4. Rezim Kepemimpinan Mohammad Khatami

Sayed Mohammad Khatami merupakan presiden Iran kelima menggantikan Hashemi Rafsanjani. Khatami lahir pada 14 Oktober 1943 dalam karir politiknya Khatami banyak mendapatkan dukungan dari publik moderat Iran, sehingga pada pemilu yang berhasil membawa kemenangannya Khatami berhasil memenangkan jumlah perolehan suara sebesar lebih dari 74 persen.¹⁶

Dalam orientasi politik luar negerinya terhadap israel, Khatami cenderung menjalankan tindakan-tindakan yang kurang jelas. Bahkan Khatami cenderung menjalankan kebijakan-kebijakan yang moderat melalui pembangunan poros perimbangan dengan negara-negara Barat.

Dalam menangani masalah konfrontasi antara Israel dan Palestina, Khatami berupaya membangun rekonsiliasi konflik melalui pemufakatan, yaitu pengedepanan jalan diplomasi dibandingkan dengan tindakan-tindakan represifisme lainnya. Selain itu, Khatami juga menekankan pada upaya membangun forum dialogis dengan negara-negara Barat, termasuk di dalamnya Amerika Serikat.¹⁷

Dalam sepanjang karir politiknya sebagai presiden Iran, yaitu periode 8 Agustus 2001 hingga 3 Agustus 2005, Khatami telah banyak berupaya membawa masalah Palestina sebagai bagian dari politik luar negeri terhadap Israel ke forum-forum pertemuan internasional. Beberapa contoh upaya rekonsiliasi dan bagian

¹⁶ "Profile : Mohammad Khatami", <http://www.newsbbc.co.uk>, diakses pada tanggal 12 April 2010.

¹⁷ "Khatami and the Search For Reform in Iran", <http://www.stanford.edu>, diakses pada tanggal 12 April 2010.

dari simpati negara-negara internasional, Khatami telah berhasil bertemu dengan Pope John Paul II, Presiden Perancis Jaques Chirac, Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Presiden Venezuela Hugos Chaves, beberapa tokoh nasional Jepang antara lain Junichiro Koizumi, Koichiro Matura, Matsuya Ato hingga Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Kofi Annan. Upaya-upaya pertemuan dengan tokoh politik internasional tersebut karena Khatami melihat bahwa figur-figur tersebut dianggap sebagai pihak yang netral terkait dengan kasus konflik Israel-Palestina.¹⁸

Upaya Khatami sebagai bagian dari orientasi politik luar negeri Iran terhadap Israel juga diimplementasikan melalui penguatan kemitraan sipil antara Iran dengan Amerika Serikat. Selain itu, Khatami juga memfasilitasi terbentuknya organisasi supra nasional yang salah satu tujuannya adalah menjadi forum mediasi penyelesaian konflik Israel Palestina. Beberapa organisasi ini, yaitu :¹⁹

- a. IIDACC (*International Institute for Dialogue Among Cultures and Covilizations*).
- b. *Baran Foundation*.
- c. *Liberty and Development Foundations*.

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat diketahui tentang dinamika politik luar negeri Iran dan Israel, yang menjadi ujung dari perseteruan kedua negara akibat kasus invasi Israel ke Palestina tahun 2008/2009. Dalam menanggapi masalah tersebut kemudian Iran mewujudkan sikapnya dalam

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ "Islam, Liberty and Development : Mohammad Khatami", <http://www.amazon.com>, diakses pada tanggal 12 April 2010.

diplomasi konfrontatif yang akan di bahas dalam deskripsi dan analisis perbandingan bagi kebijakan pemerintah Iran di bawah kepemimpinan Mahmud Ahmadinejad sebelum dan pasca invasi Israel ke Palestina tahun 2008. Gambaran mengenai hal ini akan dibahas pada bab selanjutnya yang merupakan bagian dari pembuktian hipotesa karya penelitian skripsi ini.